

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi sektor publik di Indonesia berkembang dengan cepat seiring dengan diberlakukannya berbagai peraturan, otonomi daerah, desentralisasi fiskal yang diawali sentralisasi pemerintah daerah. Pada saat yang sama, globalisasi yang semakin pesat telah menimbulkan tuntutan untuk meningkatkan daya saing di semua negara, termasuk di tingkat pemerintahan regional. Peningkatan intelektualitas masyarakat yang terus berkembang di era globalisasi mendorong pihak daerah untuk mampu mengelola lembaga pemerintahan secara efektif dan bertanggung jawab atas pencapaian tujuan lembaga tersebut. Pelaksanaan keuangan daerah tunduk pada peraturan pemerintah yang mengamanatkan pengendalian ekonomi daerah yang efektif, ekonomis, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Laporan keuangan daerah selama satu tahun anggaran ditampilkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Komponen-komponen yang harus dicantumkan dalam laporan keuangan diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual PP No. 71 Tahun 2010 yang merupakan modifikasi dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, semuanya tercakup dalam dokumen ini. Bagi pemerintah daerah, hal ini berarti menghasilkan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berkualitas tinggi untuk menjamin transparansi publik dalam pelaporan keuangan.

Pengelolaan keuangan publik dan pemerintah harus dilandasi dengan transparansi dan akuntabilitas untuk menghasilkan laporan keuangan berkualitas tinggi yang memenuhi semua standar dan peraturan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas (Imran, 2023). Dengan demikian, dapat dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas yang kemudian dapat dipublikasikan kepada publik sesuai dengan peraturan dan kriteria yang berlaku. Laporan keuangan daerah harus diserahkan untuk diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitasnya. Pengguna informasi cenderung mempertanyakan kebenaran penyajian data bahkan ketika informasi dalam laporan keuangan dianggap relevan, karena keandalannya tidak dapat dijamin. Oleh karena itu, untuk memenuhi standar akuntansi yang relevan dan mendapatkan kepercayaan pengguna, laporan keuangan harus dapat diandalkan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang baik menunjukkan sejauh mana laporan keuangan suatu entitas ekonomi dianggap jujur, dapat diandalkan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, menurut penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan empat jenis opini: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Menyatakan Pendapat (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mengalami peningkatan, khususnya selama lima tahun terakhir pada periode 2018-2022,

berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2023 oleh BPK. Dari 542 pemda yang diperiksa BPK pada tahun 2022, sebanyak 496 pemerintah daerah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 41 pemerintah daerah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan 5 pemerintah daerah memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Namun, pada tahun 2022 terdapat beberapa Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengalami penurunan opini yaitu, 2 Pemprov, 12 Pemkab dan 4 Pemkot yang mendapat penurunan dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 1 Pemkab mendapat penurunan dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Beberapa Hal-hal berikut ini mempengaruhi penyajian LKPD tahun 2022 dan menyebabkan LKPD tidak memperoleh opini WTP: penyetoran kas di bendahara pengeluaran belum dipulihkan dengan cara menyetor ke kas daerah; aset tetap tidak dicatat dan/atau tidak dapat ditelusuri; realisasi belanja barang dan jasa tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan atau tidak sesuai dengan ketentuan; kelebihan pembayaran karena volume pekerjaan tidak mencukupi dan ketidaksesuaian dengan spesifikasi pekerjaan; dan proses perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan belum dipulihkan dengan cara menyetor ke kas daerah. (<https://wartapemeriksa.bpk.go.id>).

Tabel 1. 1
Hasil Pemeriksaan BPK

Tahun Anggaran	Opini BPK
2018	TMP
2019	WDP
2020	WDP
2021	WDP
2022	WDP

Sumber: <https://sumut.bpk.go.id/>

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Kabupaten Simalungun menunjukkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk tahun 2019 sampai dengan 2022 dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) untuk tahun 2018.

Berdasarkan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2018, BPK memberikan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) karena kurangnya kas di Kas Daerah, tidak adanya rincian aset yang memadai untuk mendukung nilainya, dan tidak adanya kondisi aktual dan dokumentasi yang sah yang mendukung realisasi aset tersebut. Pelaksanaan sistem pengendalian akuntansi yang kurang baik, anggaran pendapatan dan pengeluaran, serta struktur pengendalian internal yang kurang memadai, semuanya berkontribusi terhadap masalah-masalah tersebut. (<http://www.bpk.go.id/>).

Kabupaten Simalungun mengalami peningkatan opini dari Tidak Memberikan Pendapat (TMP) pada tahun 2018 menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2019, dimana BPK menunjukkan satu permasalahan utama yang menghambat penyajian Laporan Keuangan Pemerintah. Pada tahun 2022, Kabupaten Simalungun mendapatkan opini Wajar Dengan

Pengecualian (WDP) setelah penilaian BPK menunjukkan adanya kelemahan pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Simalungun telah berupaya pada tahun 2022 untuk melaksanakan rekomendasi LHP BPK dengan melakukan reklaiming aset tetap dari pihak ketiga, melakukan penelusuran aset, menjabarkan aset tetap yang digabungkan, mengkapitalisasi pekerjaan restorasi dan pemeliharaan, memberikan jasa konsultan yang dicatat sebagai aset sendiri menjadi aset induk, dan melakukan pemindahtanganan aset yang bukan merupakan aset pemerintah daerah. Oleh karena permasalahan aset tetap tersebut belum sepenuhnya diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun, maka tidak dapat diterima secara wajar aset tetap yang tercantum dalam neraca. (<https://web.simalungunkab.go.id/>).

Atas ketidaksesuaian aset yang disajikan pada neraca dalam LKPD Kabupaten Simalungun dan lemahnya sistem pengendalian internal mengakibatkan pemerintahan Kabupaten Simalungun belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penyebab lemahnya Sistem Pengendalian Internal menurut BPK disebabkan oleh kurang optimal penerapan pengendalian, ketentuan yang belum sesuai maupun pencatatan anggaran yang tidak akurat. Situasi ini menunjukkan bahwa konsep akuntabilitas belum sepenuhnya ditegakkan oleh pemerintah Kabupaten Simalungun.

Laporan keuangan yang dapat memberikan kepuasan dan keyakinan terhadap masyarakat apabila kepala daerah dapat membudayakan akuntabilitas dalam menjalankan pemerintahan. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa tanggungjawab dan penerapan Peraturan atau Undang-Undang telah

dilaksanakan oleh Kepala Daerah yang mencerminkan meningkatnya akuntabilitas laporan keuangan. Untuk memastikan bahwa program pelayanan publik mencapai hasil dan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan tujuan, maka akuntabilitas harus diterapkan sejak awal pada tahap perencanaan, pengembangan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian program. (Ferlia dkk., 2023).

Penelitian Laksono (2023) menunjukkan bahwa faktor berikut ini mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah: akuntabilitas, semakin besar nilai akuntabilitas dalam laporan keuangan, maka semakin tinggi pula kualitasnya. Sedangkan menurut penelitian Hamsinar (2022) Akuntabilitas merupakan komponen penting dalam proses penyusunan laporan keuangan karena dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Publik diberi informasi tentang pengelolaan sumber daya yang diberikan kepada mereka untuk diawasi melalui rilis data keuangan pemerintah. Menetapkan tujuan hanya untuk kepentingan lembaga dan bukan kepentingan individu merupakan keharusan bagi pemerintah, sebagai layanan publik. Keberhasilan organisasi tergantung pada akses ke sumber daya manusia yang terbaik. Pegawai yang memiliki kompetensi dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik, dan kualitas kinerja dapat diketahui dengan menilai kompetensi yang dimiliki. Manajemen keuangan melibatkan anggota staf yang memiliki keahlian di bidangnya dan pengetahuan akuntansi yang kuat agar mereka dapat memahami pedoman akuntansi yang diterapkan pada pembuatan dan pengungkapan laporan keuangan.

Mitjo dkk., (2022) penelitiannya menyatakan bahwa Sumber daya manusia profesional yang bekerja pada SKPD Kabupaten Halmahera Utara memiliki

pengaruh yang kuat dan positif terhadap kualitas laporan keuangan yang mereka susun karena mereka telah memahami dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang aturan akuntansi pemerintahan. Sedangkan penelitian Shinta dkk., (2020) menyatakan bahwa bahwa pengetahuan akuntansi dan ekonomi yang kurang memadai di antara anggota staf, sehingga mengakibatkan Laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Klaten menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang rendah.

Selain itu, karena teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan data keuangan dan pembuatan laporan keuangan, maka perlu dikembangkan laporan keuangan yang berkualitas tinggi. Tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam menggunakan teknologi informasi, seperti ketersediaan perangkat lunak atau perangkat keras, keterbatasan dana, dan ketersediaan sumber daya manusia.

Sintia dkk., (2022) Menurut temuan penelitiannya, ketika sistem akuntansi keuangan daerah, kapasitas pemerintah, dan pemanfaatan teknologi informasi dinilai secara bersamaan atau kolaboratif, pelaporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten OKI mengalami peningkatan yang signifikan. Kualitas pelaporan keuangan daerah dipengaruhi oleh penggunaan teknologi informasi. Penelitian Ridzal dkk., (2022) di Kabupaten Buton Selatan menunjukkan bahwa teknologi informasi telah dioptimalkan, termasuk cara penggunaan perangkat keras, perangkat lunak, dan aplikasi. Oleh karena itu, berdasarkan temuan penelitian, memaksimalkan laporan keuangan akan menjadi lebih berkualitas berkat penggunaan teknologi informasi.

Pengendalian internal berfungsi sebagai faktor eksternal yang membantu organisasi mencapai tujuan dan sasarannya. Kesalahan dan penipuan dalam pencatatan transaksi dan tampilan informasi keuangan dapat dihindari dengan sistem kontrol internal yang kuat, dan deteksi serta koreksi kesalahan yang cepat difasilitasi oleh prosedur deteksi yang efisien. Sehingga, sistem pengendalian internal yang kuat memungkinkan organisasi untuk menjadi lebih kuat. Penelitian (Langwo & Syahdan, 2022) menyatakan telah ditunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal dapat mengatur Pemahaman SAP. Ketika menyusun laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan kriteria pelaporan keuangan yang berlaku, Sistem Pengendalian Intern (SPI) bertujuan untuk menjamin bahwa aturan-aturan yang ada ditaati. Selama laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pemerintah daerah yang membangun Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang kuat selama proses penyusunan laporan keuangan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan akhir.

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini sangat penting karena fakta bahwa penelitian sebelumnya telah banyak melakukan penelitian tentang topik ini, tetapi hasilnya berbeda. Peneliti perlu melakukan penelitian ulang untuk mengevaluasi bagaimana akuntabilitas, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan sistem pengelolaan keuangan yang berfungsi.

Penelitian ini ialah replikasi dari penelitian yang dilaksanakan oleh Budiman dkk., (2023) yang berjudul Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan dengan

sistem pengendalian intern sebagai variabel moderasi. Yang menjadi pembeda penelitian ini terhadap penelitian terdahulu ialah sebagai berikut:

1. Pada penelitian ini, peneliti menambahkan variabel akuntabilitas yaitu, konsep akuntabilitas belum sepenuhnya ditegakkan oleh pemerintah Kabupaten Simalungun dan menambahkan variabel akuntabilitas akan melihat secara lebih mendalam bagaimana tanggung jawab dan transparansi dalam pengelolaan keuangan yang akan mempengaruhi hasil dari penggunaan sumber daya manusia yang berkompeten dan teknologi informasi dalam menjaga pengendalian internal.
2. Populasi dan sampel penelitian tidak sama terhadap penelitian terdahulu, dimana penelitian terdahulu dilaksanakan di Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kutai Timur sedangkan dalam studi ini penelitian ini pada OPD Kabupaten Simalungun sehingga peneliti dapat melihat apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan seperti akuntabilitas, kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi maupun pengendalian internal mempengaruhi dengan cara yang serupa atau berbeda.

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, maka penulis hendak melaksanakan penelitian dengan mengangkat judul “Pengaruh Akuntabilitas,

Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Simalungun)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah penelitian ini adalah :

1. Kabupaten Simalungun telah menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama empat tahun berturut-turut, yaitu dari 2019 hingga 2022, menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah tersebut belum berkualitas.
2. Transparansi dan akuntabilitas yang tidak memadai dalam pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
3. Kinerja karyawan tidak efektif dalam hal pendokumentasian dan pembuatan laporan keuangan, karena tidak sesuai dengan keterampilan departemen sumber daya manusia.
4. Sejak ditemukannya penyimpangan dalam dokumentasi laporan keuangan pemerintah Kabupaten Simalungun, penggunaan teknologi informasi menjadi tidak optimal.
5. Sistem pengendalian internal masih belum berjalan dengan baik, dan peraturan perundangan yang berlaku belum ditaati.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian penulis mengenai pengaruh akuntabilitas, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi dengan sistem pengendalian intern yang berperan sebagai pemoderasi membatasi pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Kabupaten Simalungun.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini, difokuskan pada studi empiris di OPD Kabupaten Simalungun, yang dirinci sebagai berikut :

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah sistem pengendalian internal dapat memoderasi hubungan akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
5. Apakah sistem pengendalian internal dapat memoderasi hubungan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
6. Apakah sistem pengendalian internal dapat memoderasi hubungan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka fokus yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal memoderasi hubungan akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
5. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal memoderasi hubungan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
6. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal memoderasi hubungan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan di bawah ini :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis yang signifikan dalam bidang akuntansi sektor publik, khususnya terkait dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang mekanisme yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam pemahaman mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat

mempengaruhi kualitas laporan keuangan di lingkungan pemerintah daerah dan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan peneliti dan meningkatkan visibilitas akademik peneliti dalam bidang akuntansi sektor publik.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mendorong akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, seiring dengan meningkatnya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara akuntabel dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat menjadi dasar bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan dan monitoring yang lebih efektif terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat mendorong akuntabilitas pemerintah daerah.